

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya pikat yang baik. Bukan saja karena Indonesia terdiri dari beragam tradisi dan kebudayaan, namun kekayaan alam yang terbentang antara desa satu dengan desa yang lain memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sehingga ketika wisatawan mencoba untuk mengetahui lebih dalam salah satu desa wisata di Indonesia, sudah barang tentu akan mengunjungi. Oleh karena itu, prinsip utama yang diterapkan oleh desa adalah bagaimana nilai-nilai luhur baik tradisi maupun kebudayaan yang melekat dan sudah menjadi karakter harus tetap terlindungi.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan Nasional. Adapun pengertian geografi pariwisata menurut Pearce dalam Pranomo (2012) adalah studi terapan dari konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan - pendekatan geografi terhadap aspek - aspek pariwisata pada wilayah permukaan bumi, terdapat 6 (enam) wilayah topik yang menyusun komponen geografi pariwisata yaitu, Pola keruangan penawaran (*spatial patterns of supply*), pola keruangan permintaan (*spatial patterns of demand*), Geografi tempat-tempat wisata (*the geography of resort*), Geografi dan aliran wisatawan (*tourist movement and flows*), dampak pariwisata (*the impact of tourism*), model-model keruangan pariwisata (*models tourism space*).

Potensi wisata disini dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Hal tersebut dijelaskan bahwa potensi wisata dijelaskan dibawah ini sebagai berikut : 1) Potensi Alam yang dimaksud dengan potensi alam adalah

keadaan dan jenis flora fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lainlain. 2) Potensi Kebudayaan; yang dimaksud dengan potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, Peninggalan, bersejarah berupa bangunan atau monumen. 3) Potensi Manusia; manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah

Pengembangan pariwisata menurut (Maryani2019) adalah peningkatan komponen yang terkait dengan kepariwisataan, dengan tujuan agar jumlah wisatawan yang datang lebih banyak, lebih lama tinggal, lebih banyak mengeluarkan uang, dan kepuasan wisatawan dapat terpenuhi secara optimal, serta lingkungan destinasi dapat tetap terjaga. Ini penting mengingat perencanaan membutuhkan suatu tindak lanjut, baik yang berupa pekerjaan fisik maupun penanganan yang bersifat sosial ekonomi. Selain itu perlu diperhatikan bahwa untuk perencanaan seringkali diperlukan suatu unit besaran tertentu. Dalam suatu perkembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah. Peran pemerintah di dalam pariwisata sendiri salah satunya adalah tentang pengaturan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing objek wisata. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah menurut Wardiyanto dan (Baiquni, 2015) akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat.

Pariwisata menjadi salah satu industri terbesar di dunia yang merupakan pendapatan yang paling utama dalam menghasilkan devisa dan lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan ekonomi yang baik bagi masyarakat, pemerintah dan Negara. Pariwisata tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang relatif kaya namun bisa dinikmati semua kalangan mulai dari

menengah atas sampai menengah bawah. Selain dari itu, pariwisata menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia berupa kegiatan social dan ekonomi. Pariwisata mulai berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia, yang ditandai dengan perkembangan jumlah kunjungan turis, orang lokal, luar pulau dan pendapatan yang diperoleh dari turis internasional. Pariwisata merupakan industri gaya baru mampu memacu pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam peluang lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup 4 dan sektor lain didalam Negara penerimaan wisatawan.

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Bahkan pariwisata diharapkan akan menjadi penghasil devisa nomor satu. Potensi untuk pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terbatas. Selain itu, penduduk di Indonesia memiliki kebudayaan yang tinggi dan merupakan bangsa yang sangat ramah. Sifat ramah tamah rakyat Indonesia merupakan salah satu potensi besar dalam bidang pariwisata. Karena disamping keindahan alam dan atraksi wisata, ramah tamah juga merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk mengembangkan sektor wisata sehingga menjadi suatu industri pariwisata yang memadai maka memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah dengan kebijakannya. Industri pariwisata adalah suatu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan. Bagi pihak swasta dengan modal dan investasinya maka masyarakat ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan budaya setempat.

Potensi wisata lokal yang ada di desa memang akhir-akhir ini sangat diminati oleh wisatawan yang rindu pada alam terbuka, interaksi dengan lingkungan, dan masyarakat lokal. Dalam Antara dan Arida (2015) Desa Wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Joshi, 2012).

Glinggang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di desa Glinggang ini memiliki potensi yang besar yang belum mampu dikembangkan oleh pemerintah desa dalam bidang pariwisata diantaranya potensi air yang melimpah, pemandangan alam yang indah, kebudayaan masyarakat yang masih kuat, serta potensi hasil pertanian yang melimpah . Dari potensi yang dimiliki, timbul ide-ide masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satu contoh Festival Methik Padi yang sudah menjadi festival tahunan yang berlangsung tiap panen raya di desa Glinggang.

Dari permasalahan yang di angkat oleh judul, Potensi wisata menurut Pitana (2009) adalah daya tarik yang terkandung pada suatu daerah untuk dikembangkan menjadi suatu obyek wisata yang menarik sehingga dari situ dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke daerah tersebut dan biasanya masih belum dikelola dengan baik. Potensi pada destinasi wisata dipengaruhi adanya 4 pendekatan yang lebih dikenal dengan istilah 4A antara lain: atraksi, aksesibilitas, amenitas dan aktivitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam melakukan analisis potensi yang ada di Desa Glinggang dengan judul **Upaya Desa Glinggang Dalam Mengangkat Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berpegang teguh pada latar belakang masalah dan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penggalan data, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Upaya Desa Glinggang Dalam Mengangkat Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Ponorogo?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Desa Glinggang Dalam Mengangkat Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Ponorogo.
2. Untuk memperbaiki promosi Festival “Methik Padi” agar menjadi tempat Pariwisata Di Ponorogo.
3. Untuk menyebar luaskan Festival “Methik Padi” agar di kenal masyarakat lainnya untuk menjadi Potensi Pariwisata Di Ponorogo.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai masukan dan sumbangan khazanah keilmuan dan dapat memberikan kontribusi dalam ranah pendidikan. Hasil penelitian ini.

- a. Bagi Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo, agar dapat menambah khazanah keilmuan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pariwisata di Desa Glinggang, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti sendiri, sebagai tambahan khazanah keilmuan baru berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi beberapa informasi mengenai penerapan “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai cara berkomunikasi dan strategi public relations.

3. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran oleh pihak masyarakat dan pihak Kelurahan Desa Glinggang sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan untuk mengangkat Festival “Methik Padi” agar di kenal masyarakat lainnya untuk menjadi Potensi Pariwisata Di Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

1. Pariwisata

Pengertian Pariwisata Istilah pariwisata belum dipahami banyak orang namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk Gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia.

Pengertian pariwisata menurut Norval menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu Negara, kota atau wilayah tertentu. Sedangkan Hunziker dan Kraft memberikan pengertian pariwisata, keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dimana

perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1969, pengertian kepariwisataan adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, bahwa pengertian “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha

2. Jenis-jenis produk pariwisata

Jenis-jenis Produk Pariwisata Produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu kesatuan yang masing-masing unsur saling terkait. Produk pariwisata adalah semua jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan semenjak yang bersangkutan berangkat meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan pariwisata yang dipilihnya, dan akhirnya kembali ke tempat tinggal semula.

Menurut Yoeti (1996, hal. 119-126), pariwisata dapat diklasifikasikan menurut letak geografis, menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, menurut alasan atau tujuan perjalanan,

menurut saat atau waktu berkunjung dan menurut obyeknya. Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang
 - 1) Pariwisata lokal (*local tourism*)
 - 2) Pariwisata regional (*regional tourism*)
 - 3) Pariwisata nasional (*national tourism*)
 - 4) Pariwisata regional-internasional
 - 5) Kepariwisataaan dunia (*international tourism*)
- b) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
 - 1) In Tourism atau pariwisata aktif
 - 2) Out-going Tourism atau pariwisata pasif
- c) Menurut alasan atau tujuan perjalanan
 - 1) Business tourism
 - 2) Vocation tourism
 - 3) Educational tourism
- d) Menurut saat atau waktu berkunjung
 - 1) *Seasonal tourism*
 - 2) *Occasional tourism*
- e) Menurut obyeknya
 - 1) *Cultural tourism*
 - 2) *Recuperational tourism*
 - 3) *Commercial tourism*
 - 4) *Sport tourism*
 - 5) *Political tourism*
 - 6) *Social tourism*
 - 7) *Religion tourism*

Jenis-jenis pariwisata tersebut bisa bertambah, tergantung pada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kreativitas para ahli professional yang berkecimpung dalam industri pariwisata. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, maka semakin bertambah pula bentuk

dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata (Pratiwi, 2015).

Jenis atau bentuk produk pariwisata yang dibutuhkan secara langsung oleh wisatawan adalah terdiri dari berbagai jasa pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a) Jasa perjalanan wisata.
- b) Jasa transportasi wisata.
- c) Jasa penyediaan akomodasi.
- d) Jasa makanan dan minuman
- e) Jasa daya tarik wisata.
- f) Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- g) Jasa wisata tirta.
- h) Jasa informasi pariwisata, dan jasa pramuwisata.

Sedangkan industri lain yang menghasilkan produk jasa, juga dibutuhkan oleh wisatawan saat melakukan perjalanan wisata, antara lain: toko souvenir, bank, penukaran uang, rumah sakit, pos dan telekomunikasi, dan usaha perdagangan lainnya.

Menurut Ismayanti dalam Pranata (2012:10) jenis wisata dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

- a) Wisata Kuliner Wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya.
- b) Wisata Olahraga Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung. Kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, tetapi menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja.

- c) Wisata komersial Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- d) Wisata bahari Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut.
- e) Wisata industri Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.
- f) Wisata Bulan Madu Suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.
- g) Wisata Cagar Alam Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa jenis wisata tersebut dapat berkembang dikemudian hari, seiring dengan berubahnya ketertarikan dan keinginan dari pengunjung atau wisatawan.

3. Fungsi Dan Tujuan Kepariwisataan

Menurut Yoeti dalam Anindita (2015:67), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan

maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Menurut Wahid (2015:78),

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: kepariwisataan berfungsi memnuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

4. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata secara tata bahasa bermakna suatu perjalanan yang lengkap, secara keseluruhan pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah

Model pengembangan pariwisata dengan pendekatan pengembangan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (beginning), tahap pertengahan (middle), dan tahap lanjutan (advanced). Tahapan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam proses pengembangan pariwisata. Pada tahap awal (beginning), peran pemerintah menjadi sangat sentral. Mengingat pemerintah memiliki visi dan misi dalam pembangunan daerah, sehingga komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata sudah tercantum dalam misi pembangunan daerah. Selain itu, pada tahap awal ini, peran dan partisipasi masyarakat masih belum terlihat. Pendekatan pengembangan masyarakat masih menggunakan strategi direktif (instruktif). Pendekatan direktif ini akan diarahkan untuk pembentukan budaya pariwisata di masyarakat.

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan baik bagi negara, daerah maupun desa. Ketentuan tentang kepariwisataan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan kepariwisataan adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara

manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Batasan tentang pariwisata menunjukkan bahwa sektor ini mencakup dan bersinggungan dengan dengan banyak perikehidupan, dimulai dari perikehidupan sosial, budaya, etika, lingkungan hidup, tata krama, tata susila dan yang paling banyak adalah bersentuhan dengan kepentingan pendapatan baik sektor publik maupun privat.

5. Pemerintahan Desa

Desa atau yang biasa kita sebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan mengurus urusan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan inilah yang disebut dengan otonomi desa. Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki akibat dimana Desa dapat mengatur pemerintahannya sendiri dengan leluasa berdasarkan prakasa masyarakat demi kepentingan bersama dan tidak bertentangan dengan pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dan segenap pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan, dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, keberadaan, dan kehidupan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat dari serangkaian keluarga yang mengatur rumah tangganya. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan sarana, dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dalam penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan Desa

bersama dengan partisipasi masyarakat ikut menyusun perencanaan pembangunan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Kebijakan nasional mengenai Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan Mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dilihat dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kebijakan nasional tersebut sekarang ini telah dikukuhkan pula dalam Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945.

Urusan Pemerintahan Desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas Pemerintah Desa, Urusan Pemerintahan Desa secara umum ada dua yaitu urusan dekonsentratif dan urusan partisipatif. Untuk desa yang berotonomi desa selain dua urusan tersebut ditambah dengan urusan rumah tangga desa. Urusan dekonsentratif yaitu urusanurusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah lebih atas.

Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Urusan partisipatif yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan, sebagai sarana pendidikan dan pembangunan.

6. Pendapatan Desa

Dalam rangka melaksanakan pembangunan desa, tentunya pemerintahan desa memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu potensi yang ada di desa perlu digali dan dikembangkan sehingga dapat menambah pemasukan kas desa. Pendapatan Desa merupakan unsur yang sangat penting dan memiliki peran yang menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa maupun pembinaan kemasyarakatan Desa. Bagi Desa yang bersifat otonom yang berarti berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pendapatan Desa merupakan penyangga utama bagi berjalannya Otonomi Desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa yang meliputi:
 - 1) hasil usaha desa;
 - 2) hasil kekayaan desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
 - 1) Sumbangan dari pihak ketiga.

7. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata secara tata bahasa bermakna suatu perjalanan yang lengkap, secara keseluruhan pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah

Model pengembangan pariwisata dengan pendekatan pengembangan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (beginning), tahap pertengahan (middle), dan tahap lanjutan (advanced). Tahapan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam proses pengembangan pariwisata. Pada tahap awal (beginning), peran pemerintah menjadi sangat sentral. Mengingat pemerintah memiliki visi dan misi dalam pembangunan daerah, sehingga komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata sudah tercantum dalam misi pembangunan daerah. Selain itu, pada tahap awal ini, peran dan partisipasi masyarakat masih belum terlihat. Pendekatan pengembangan masyarakat masih menggunakan strategi direktif (instruktif). Pendekatan direktif ini akan diarahkan untuk pembentukan budaya pariwisata di masyarakat.

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan baik bagi negara, daerah maupun desa. Ketentuan tentang kepariwisataan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan kepariwisataan adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Batasan tentang pariwisata menunjukkan bahwa sektor ini mencakup dan bersinggungan dengan dengan banyak perikehidupan, dimulai dari perikehidupan sosial, budaya, etika, lingkungan hidup, tata krama, tata susila dan yang paling banyak adalah bersentuhan dengan kepentingan pendapatan baik sektor publik maupun privat.

Tujuan pariwisata menurut Sari (2004: 7-8) adalah memberikan dampak positif dan keuntungan sebesar-besarnya baik bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat, pemerintah, swasta, maupun bagi wisatawan. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya adalah:

- a) Penerimaan devisa dapat diperbesar,
- b) Memperluas lapangan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat,
- c) Memperluas bidang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat,
- d) Mendorong pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan suatu sarana pendukung pembangunan kepariwisataan nasional. Di tingkat desa, maka arah pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor, yaitu pertama, wilayah pedesaan, memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan yang masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual

budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan

8. Festival

Secara etimologi, istilah festival berasal dari bahasa Latin, yaitu *festum* yang berarti kegembiraan rakyat dan *feria* yang berarti libur dari kerja sehari-hari untuk menghormati Tuhan atau para dewa. Dari *festum* dalam bahasa Latin, berkembanglah istilah *fiesta* dalam bahasa Italia dan Portugis, *fete* dalam bahasa Perancis, *fiesta* dalam bahasa Spanyol, dan *festival* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kontemporer, *festival* berarti:

- a. Masa perayaan yang sakral maupun profan, yang ditandai dengan berbagai upacara tradisi;
- b. Pesta tahunan atau berkala yang merayakan hari lahir orang suci atau perayaan panen;
- c. Acara kebudayaan yang terdiri dari berbagai seni pertunjukan dan pameran kesenian;
- d. Pameran, atau pasar;
- e. Kegembiraan dan kemeriahan rakyat.

9. Methik Padi

Adat *Methik Pari* merupakan adat yang dilakukan para petani ketika memetik padi untuk pertama kali pada masa panen. *Methik* dalam bahasa Indonesia memiliki arti memilih atau mengambil, sedangkan *pari* memiliki arti padi. Berbeda dengan *Keleman* yang masih ada unsur mistis, adat *Methik pari* lebih bertujuan ke rasa syukur

yang mendalam para petani terkait hasil panen yang bagus dan melimpah.

Trihatmodjo dalam Oka A. Yoeti (1997: 5) memaparkan bahwa berhasilnya suatu tempat menjadi daerah tempat wisata sangat tergantung pada tiga A, yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*). Maryani (1991:11) juga menambahkan bahwa berkembangnya suatu daerah untuk menjadi suatu daerah wisata agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dapat dilihat dari:

- a. *How to arrive*
- b. *Something to see*
- c. *Something to do*
- d. *Something to buy*
- e. *How to stay*

Berdasarkan pemaparan di atas, maka indikator keberhasilan pengembangan objek wisata dapat dilihat dari yaitu peningkatan jumlah pengunjung, peningkatan kualitas dan kuantitas daya Tarik objek wisata, peningkatan pendapatan objek wisata.

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah didalam yurisdiksi nasional, regional, municipal, dan lokal. Namun satu hal yang pasti bahwa apapun isi rumusan kebijakan publik, semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu demi memenuhi kepentingan publik. Melalui penormaan tingkah laku, hukum memasuki semua segi kehidupan manusia, dan memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat satu terhadap yang lain.

Jenkins (1978) dan Udoji (1981) seperti dikutip Sholichin Abdul Wahab (2001 : 4 - 5) mendefinisikan kebijakan publik/ kebijakan negara sebagai berikut: W.I. Jenkins merumuskan kebijakan negara sebagai " a set of interrelated decisions taken by a political actor or

group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of there actors to achieve". (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara - cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan - keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas - batas kewenangan kekuasaan dari cara aktor tersebut).

Menurut Richard Rose bahwasanya kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri

Chief J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan negara sebagai "an santioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Sementara ada para ahli yang menitik beratkan kebijakan sebagai suatu serangkaian keputusan atau tindakan. Parker mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitan dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Dari pandangan Nakamura Smallwood ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah serangkaian perintah untuk melakukan suatu kegiatan yang dimulai dari perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan industri pariwisata pada wilayah Kabupaten Semarang merupakan pelestarian atau pengawetan tempat bersejarah sebagai aset pariwisata budaya dan sejarah, yang

perlu dibenahi sarana dan prasarana guna menyerap dan menampung wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung. Dengan adanya minat wisatawan untuk datang dan berkunjung akan berdampak pada perekonomian masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Glinggang.

2. Kebijakan pengembangan pariwisata

Kebijakan adalah arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum 19 mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik dipemerintahan maupun diluar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut (Pitana dan Diarta, 2009:106). Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari. Suwanto (2004:19) menyebutkan bahwa untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata haruslah melakukan pengembangannya dalam melaksanakan pembangunan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, kebijaksanaan yang digariskan adalah bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora, dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa pembangunan kepariwisataan dengan diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta alam kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Agam juga menjelaskan bahwasanya pembangunan destinasi pariwisata mencakup:

- a) Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata
- b) Pembangunan daya tarik wisata
- c) Pembangunan aksesibilitas pariwisata
- d) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata menurut Suwanto (2006:57) yaitu :

1. Kebijaksanaan Umum Pengembangan Wisata
2. Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan.
3. Pola kebijakan pengembangan objek wisata. Pola kebijakan
4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
5. Pola kebijaksanaan pengembangan pemasaran
6. Kebijakan pengembangan kelembagaan
7. Kebijaksanaan pengembangan industri

Dari beberapa indikator yang mengarah pada kebijakan public pariwisata antara lain :

1. Adminitrasi atau anggaran dana

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata diberikan kepada daerah untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta daya saing pariwisata daerah, selain itu pemberian dana ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Di dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, diperlukan suatu petunjuk teknis terkait penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) ini, Pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata diarahkan untuk menu kegiatan yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan
- c. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

2. Pengurusan system

Dilihat dari wujud, elemen-elemen pembentuk sistem dapat berwujud (tangible) atau tidak berwujud (intangible). Lebih lanjut, menurut Anderson dan Johnson (1997), sistem memiliki sejumlah karakteristik berikut:

- a) Sistem harus memiliki semua komponennya agar dapat berfungsi secara optimal
- b) Komponen-komponen sistem harus tersusun dengan benar agar dapat berfungsi dalam mencapai tujuannya
- c) Sistem memiliki tujuan khusus sebagai bagian dari sistem yang lebih besar
- d) Sistem mempertahankan stabilitasnya melalui fluktuasi dan penyesuaian
- e) Sistem memiliki timbal balik (systems have feedback).

3. Proses perumusan

Perencanaan pariwisata mengaplikasikan konsep-konsep dasar perencanaan pada umumnya dengan penyesuaian terhadap karakteristik sistem pariwisata, untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata (Inskeep, 1991).

Proses perencanaan pariwisata antara lain :

- a) Penetapan tujuan dan sasaran
- b) Persiapan studi
- c) Survei
- d) Analisis dan sintesis
- e) Implementasi dan monitoring

- f) Formulasi kebijakan dan rencana
 - g) Rekomendasi
4. Proses pelaksanaan

Bentuk lain partisipasi masyarakat lokal dalam proses pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah dengan terlibat langsung pada usaha-usaha pariwisata yang dilakukan lewat lembaga Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Partisipasi mereka saat pelaksanaan terwujud dengan melaksanakan pembuatan seluruh sarana dan prasarana dan pembuatan jalan untuk aksesibilitas, Selain itu, mereka juga berperan penuh dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan mengelola tempat parkir. Bentuk partisipasi masyarakat ini merupakan partisipasi tenaga yang merupakan partisipasi non materiil (Ratnaningsih dan Mahagangga, 2015). Ramdani dan Karyani (2020) menambahkan bahwa proses pelaksanaan pengembangan obyek wisata bukan hanya dilakukan oleh pengelola, melainkan juga masyarakat yang tinggal di sekitar. Tahap ini merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan suatu rencana kegiatan pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan baik sebagai anggota di dalam pengurus organisasi, maupun mereka yang berjualan di sekitarnya. Bentuk-bentuk lain yang menjadi bagian partisipasi saat pelaksanaan pariwisata, yaitu masyarakat ikut terlibat dalam program, terlibat kegiatan promosi, mengikuti pembinaan masyarakat melalui pelatihan, dan ikut melaksanakan program wisata.

3. Collaborative Governance

Collaborative governance (Jung et al., 2009) ialah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, menjalankan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang

tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, Collaborative Governance merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Peran aktor yang terlibat, diantaranya terdiri dari peran pemerintah, swasta, masyarakat umum, akademisi dan juga media. Peran dari pemerintah adalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengintegrasikan program-program daerah dengan program pusat. Integrasi program-program di daerah dengan program di pusat merupakan hal yang penting karena jika tidak ada keterkaitan maka program yang dijalankan tidak ada acuan dan dasarnya. Hal tersebut lebih jauh lagi dapat menghambat proses pemantauan dari pusat ke daerah maupun pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat. Peran dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuarakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-program dari komunitas masyarakat tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari program pemerintah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka program dari pemerintah tidak dapat dijalankan secara optimal. Peran dari

sektor swasta adalah membantu pemerintah untuk memberikan stimulus berupa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pihak swasta sehingga pemerintah dapat mengadopsi inovasi tersebut bahkan dapat bersama-sama merumuskan suatu inovasi dalam hal pembangunan.

Sektor swasta juga memiliki andil untuk memberikan suntikan berupa hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Tentunya pihak pemerintah dapat terbantu dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam hal penyediaan modal maupun kerjasama berupa program-program pemerintah dengan sektor swasta yang dapat disinergikan seluruh sector mendapatkan kebermanfaatannya dari kerjasama yang dibangun. Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi akan program yang telah dirumuskan pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar.

G. Definisi Operasional

Menurut Budi Pranata (2013:18) Pengertian operasional merupakan kapasitas atau kuantitas yang tidak sesuai. Menurut Husein Umar (2008:125) Pengertian operasional merupakan penentuan suatu construct sehingga menjadi variable maupun variabel-variabel yang dapat diukur. Menurut Asep Hermawan (2009:27) Pengertian operasional merupakan penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variable. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun karakter tertentu. Adapun definisi operasional mengenai Upaya Desa Glinggang Dalam Mengangkat Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Ponorogo adalah Sebagai Berikut :

- a. Kebijakan umum pengembangan objek wisata
- b. Arah pola kebijakan pengembangan jalur wisata
- c. Pola kebijakan objek wisata
- d. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
- e. Pola kebijaksanaan pengembangan pemasaran
- f. Kebijakan pengembangan kelembagaan
- g. Kebijakan pengembangan industri

H. Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara induksi, reduksi untuk kemudian disajikan dalam bentuk sederhana, yang mudah untuk

dipahami. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai Upaya Desa Glinggang Dalam Mengangkat Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Ponorogo

1. Lokasi penelitian

Dipilihnya Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Merupakan Desa pariwisata yang belum cukup terkenal di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

2. Informan penelitian

Informan adalah pelaku yang mengetahui atau terlibat langsung dengan penelitian yang diteliti dan dapat memberikan fakta mengenai suatu hal. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan purposive sampling yaitu dengan menentukan sejumlah informan dengan cara sengaja karena alasan yang diketahui sifat sampel tersebut. Informan yang dipilih dianggap mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti dan perolehan sumber data secara langsung. Berikut ini adalah informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala Desa Glinggang
- b. Sekertaris Desa Glinggang
- c. Kasi Urusan Perencanaan Glinggang
- d. 5 warga Desa Glinggang

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau lapangan/ dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari jawaban informan dari hasil dan wawancara yang dilakukan pada Festival “Methik Padi” Sebagai Potensi Pariwisata Di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo.

- 2) Data sekunder adalah laporan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah diolah oleh lembaga/instansi/perusahaan atau referensi lainya seperti internet dan data lainnya yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, p. 2005:186).

Wawancara adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Secara umum wawancara dapat dibagi kedalam dua bagian, yakni :

- 1) Standardized interview (wawancara berencana) biasanya daftar pertanyaan (kuisisioner) telah disiapkan sebelumnya dan disusun secara sistematis. Kuisisioner yang terstruktur dan sistematis ini kemudian oleh pewawancara ditanyakan kepada responden dengan cara membacakannya kepada responden untuk dijawab.
- 2) Unstandardized interview (wawancara berencana) wawancara yang sebelumnya tidak dibekali dengan persiapan penyusunan daftar pertanyaan secara terpolat dan sistematis yang mengharuskan dipatuhi pewawancara. Namun demikian tidak berarti wawancara model ini dapat dilakukan asal-asalan, lebih mudah dilakukan, dan apalagi tidak berkualitas.

Pada wawancara ini peneliti akan menggunakan dua metode di atas menanyakan hal-hal yang penting kepada

beberapa informan yaitu kepala Desa Glinggang, dan masyarakat yang ikut andil dalam pengembangan Pariwisata “Methik Padi”. Wawancara tersebut berisi tentang apa yang telah tertulis dalam rumusan masalah. Agar data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dapat menyeluruh dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu garis besar tentang pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan sebagai panduan pelaksanaan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) yang diikuti oleh sebagian siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203)

Metode observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Observasi di bagi menjadi dua :

- 1) Observasi partisipasi lengkap, yaitu mengadakan observasi dengan cara mengikuti seluruh kehidupan responden. Cara ini banyak digunakan dalam penelitian antropologi.
- 2) Observasi partisipasi sebagian, yaitu mengadakan observasi dengan cara mengikuti sebagian dari kehidupan responden sesuai dengan data yang diinginkan.

- 3) Observasi tanpa partisipasi, yaitu mengadakan observasi tanpa ikut dalam kehidupan responden.

Karena dalam observasi ini caranya adalah peneliti hidup ditengah-tengah kelompok manusia tersebut, melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperoleh data lapangan kondisi umum di Desa Glinggang Kab. Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Menurut Sugiyono (Sugiyono, p. 2010:329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara yang mendalam.

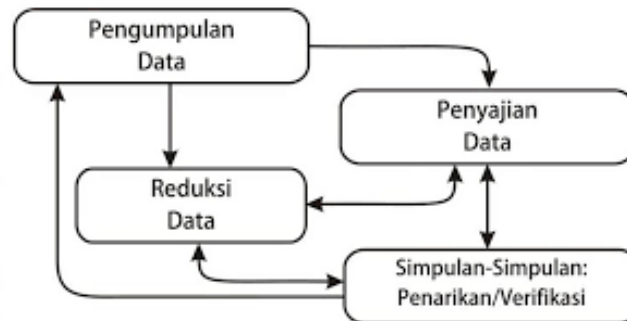
5. Analisis data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada penelitian menggunakan analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman,

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Gambar 1.1



- a. Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik dan lainnya. Bila pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplay pada laporan akhir penelitian.
- c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (verifikasi).

6. Keabsahan data

Derajat keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan tekun dan triangulasi.

- a. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- 1) Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
 - 2) Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
 - 3) Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel. Untuk pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya
- b. Member Check Meninjau kembali keterangan-keterangan atau informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara. Dalam hal ini, setelah selesai mengumpulkan data, data yang diperoleh berupa keterangan atau informasi diperiksa kembali dengan cara mengkonfirmasikannya kepada subjek penelitian maupun sumber lain yang berkompeten, dalam hal ini guru melalui diskusi balikan setiap akhir tindakan. Member check dilakukan untuk menemukan hasil perolehan sementara untuk memperoleh tanggapan, pendapat baik dari guru ataupun siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran sehingga diperoleh data yang akurat.